

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia. Etnis Tionghoa kini sudah tersebar di hampir seluruh wilayah nusantara. Keberadaan etnis Tionghoa, sebenarnya sudah ada sejak negara Indonesia masih berupa kerajaan. Saat itu etnis Tionghoa melakukan perjalanan sampai ke nusantara dengan tujuan untuk berdagang dan sejak itu pula terjadi hubungan baik antara etnis Tionghoa yang menyandang status kaum pendatang dengan penduduk asli Indonesia yang di istilahkan dengan status pribumi.

Istilah *Tionghoa* dan *Tionkok* berasal dari bahasa Kanton, yaitu salah satu bahasa Cina, dan artinya adalah orang Cina dan Negara Cina. Istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965. Akan tetapi pada tahun itu, di Bandung dalam pertemuan antara Jenderal penting dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menghasilkan keputusan menggunakan istilah ‘*Cina*’ ketika menggambarkan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, sehingga mengurangi atau menghapuskan perasaan ‘*inferior*’ dan ‘*superior*’.¹ Oleh karena alasan ini yang melatarbelakangi pengunaan istilah ‘*Cina*’, masyarakat keturunan Tionghoa merasa istilah ini adalah hinaan dan akibatnya ketika

¹Leo Suryadinata, “*Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*”, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2002, h. 43.

bebicara tentang masyarakatnya mereka memakai istilah Tionghoa dan merasa dihina ketika istilah *orang Cina* atau *Cina* dipakai.²

Etnis Tionghoa berhasil beradaptasi dengan penduduk lokal, bisa kita sadari dilingkungan sekitar bahwa masyarakat Tionghoa berupaya membangun perekonomian dalam sektor perdagangan hal tersebut menandakan bahwa etnis Tionghoa mampu berasimilasi, berakulturasasi dan disfusi dengan baik dengan masyarakat lokal sehingga hampir tidak ada ditemukan konflik yang begitu besar dan menjadi masalah nasional pada saat ini.³

Akan tetapi pada tahun 1970-an timbul kecemburuan mayarakat lokal mengenai stratifikasi yang menggambarkan masyarakat etnis Tionghoa berada di kelas menengah keatas sedangkan masyarakat lokal berada pada kelas menengah kebawah yang terkadang menimbulkan perselisihan dan konflik yang bersumber pada kecemburuan ekonomi namun disamping itu konflik bisa dicegah dengan mediasi dan konsensus diantara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal.

Pengakuan keberadaan etnis Tionghoa di nusantara, tidak seperti etnis lain yang mungkin masih mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Kemudian selain itu juga karena ada asumsi bahwa ada jurang yang memisahkan antara pribumi sebagai penduduk asli negeri ini dengan etnis

²Penamaan etnis Tionghoa merupakan penghalusan kata yang awalnya di sebut sebagai orang Cina. Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Grafiti Pers, Jakarta, 1984 h. 6

³Istilah akulturasasi mempunyai beberapa arti diantara sarjana antropologi maupun sarjana sosiologi akan tetapi terdapat kesamaan bahwa akulturasasi itu merupakan konsep proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia yang memiliki kebudayaan dan dihadapkan dengan kebudayaan asing, sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam budaya lokal tanpa menghilangkan kepribadian budaya lokal tersebut. (Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 248) misalnya dalam masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal di Bandung ditemukan capcai atau makanan khas Cina lainnya yang diadopsi oleh masyarakat lokal namun tanpa meninggalkan kepribadian masyarakat lokal dengan rasa dari makanan capcai yang disesuaikan dengan masyarakat lokal.

Tionghoa sebagai kaum pendarat, selain itu pula banyak batasan bagi perkembangan etnis Tionghoa di nusantara ini.

Eksistensi masyarakat etnis Tionghoa perlu diapresiasi dengan baik pada era Orde Baru dengan rezim Soeharto yang memberi kebijakan kepada orang Tionghoa untuk ikut serta dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia bahkan ketika Presiden Soeharto menegaskan bahwa etnis Tionghoa harus berasimilasi dengan masyarakat lokal yang dimulai dengan belajar bahasa Indonesia.

Kecemburan masyarakat lokal terhadap etnis Tionghoa tidak bisa dipungkiri. Masyarakat lokal mempunyai rasa kecemburuan baik secara ekonomi ataupun status sosial. Etnis Tionghoa, dianggap sebagai penindas masyarakat lokal yang dikarenakan etnis Tionghoa lebih berkembang pesat dalam Sektor ekonomi misalkan dengan membuka usaha kecil seperti berdagang dan sebagainya oleh karena itu terbentuk pola stratifikasi yang jauh berbeda dengan masyarakat lokal menimbulkan rasa kecemburuan yang berdampak pada kerusuhan dan pertikaian antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal hal itu terjadi pada masa Orde Baru ketika Indonesia mengalami masa krisis moneter.

Kebijakan dari presiden ke empat yaitu Gusdur yang memperbolehkan kembali bangsa etnis Tionghoa untuk berkecimpung dalam perekonomian Indonesia.⁴ Oleh karenanya etnis Tionghoa memiliki kepercayaan diri kembali untuk melanjutkan usahanya di Indonesia. Selepas peristiwa tersebut etnis Tionghoa berkembang dan berintegrasi dengan baik dengan masyarakat lokal.

⁴Op, Cit. h.115

Sedangkan masyarakat lokal merupakan masyarakat yang berada disuatu kawasan yang terikat oleh suku, keturunan dan adat istiadat. Khususnya di Kota Bandung dengan mayoritas beragama Islam dengan rasa toleransi yang dipegang erat sehingga tidak terdapat diassociatif yang termasuk didalamnya seperti pertentangan, pertikaian dan menimbulkan ketidak harmonisan.

Dengan adanya interaksi atau hubungan sosial bisa saja terjadi integrasi yang berakibat baik ataupun berakibat buruk. akan tetapi pembauran akan terjadi bila adanya sikap saling terbuka, toleransi, menghormati dan saling menerima adanya perbedaan satu sama lain. Oleh karenanya, akan terbentuk suatu transaksi yang terkontrol dan akan berdampak pada suatu integrasi.

Salah satunya yang terdapat di daerah kota Bandung dengan letak geografis yang strategis dan merupakan titik sentral bagi kawasan-kawasan daerah kota Bandung, dengan adanya rumah peribadatan seperti kelenteng menyimbolkan bahwa etnis Tionghoa diakui keberadaannya oleh masyarakat kota Bandung. Hal itu dibuktikan bahwa terdapat hubungan yang assosiatif antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal. Disamping itu terjalinnya hubungan ekonomi antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal mengakibatkan timbulnya perilaku sosial khususnya antara pemilik dan pekerja dimana terdapat unsur-unsur tindakan dan ganjaran.

Kondisi Etnis Tionghoa dan masyarakat lokal di Kota Bandung pada saat ini berjalan dengan harmonis dibuktikan dengan tidak adanya konflik yang timbul kepermukaan sehingga terlihat kontras jika dibandingkan dengan pada masa 90-an yang kerap sekali timbul perselisihan dan konflik besar di Kota Bandung bahkan

menjadi permasalahan nasional. Kerugian besar dirasakan diantara dua pihak yaitu etnis Tionghoa dan masyarakat lokal, pada saat itu, masyarakat lokal membentuk perkumpulan untuk menjatuhkan etnis Tionghoa yang pada saat itu etnis tionghoa dapat berkembang pesat dibidang perekonomian sehingga menimbulkan status sosial yang berbeda dengan masyarakat lokal bahwasanya masyarakat lokal yaitu masyarakat yang sedari dulu sudah menempati wilayah dan kekuasaanya namun ketika etnis Tionghoa datang mereka seakan tersaingi dan dikuasai khususnya dibidang perekonomian.

Pada tahun 1998 terjadi peristiwa puncak ketika pada saat itu krisis moneter terjadi imbasnya langsung terasa pada masyarakat di Kota Bandung. Perselisihan semakin besar di antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal yang di akibatkan Pemutusan Hari Kerja (PHK) secara sepihak yang tidak dapat diterima oleh masyarakat yang notabanya berkerja di perusahaan milik etnis Tionghoa, pelampiasan kemarahan masyarakat lokal dibuktikan dengan pembakaran perusahaan, toko, bahkan kendaraan milik etnis Tionghoa beberapa diantara menceritakan langsung kejadian tersebut secara detail peristiwa perselisihan terjadi di daerah pecinaan di jl. kelenteng, jl. sudirman. dan daerah pecinaan lainnya di Kota Bandung.

Oleh karena itu yang menjadi daya tarik dalam penelitian ini adalah bagaimana transaksi sosial yang ditimbulkan antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal di kawasan pecinaan Jl. Kelenteng Kelurahan. Ciroyom Kecamatan. Andir Kota Bandung. Apabila meninjau secara historis perselisihan besar dan konflik yang berkepanjangan terjadi diantara keduabelah pihak tersebut

menyimpulkan bahwa keharmonisan dan perdamaian sulit untuk terjalin jika permusuhan telah terjadi sebelumnya. Namun hal tersebut tidak mungkin berhasil jika mereka membangun interaksi yang pro-aktif dan saling membantu, saling mempercayai agar terjadi pembauran antara mereka. interaksi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal di Kota Bandung pada saat ini terjalin baik hal itu dibuktikan dengan berbaurnya dan bekerjasama dalam hal perekonomian dan perdagangan, etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal di Kota Bandung seperti halnya kupu-kupu dengan bunga yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Sebab, secara logika sulit membangun komunitas untuk saling berbaur apabila satu sama lain saling curiga atau saling tidak percaya. Keharmonisan yang terjalin erat dengan adanya interaksi yang baik, saling menghargai, sikap tolong menolong dan menanamkan rasa toleransi oleh karena itu akan tercipta kedamaian dalam perbedaan ras, keyakinan dan adat istiadat.

Menurut pemikiran tokoh sosiologi yaitu George Caspar Homans yang merumuskan transaksi sosial kedalam beberapa proposisi serta menjelaskan konsep perilaku dan tindakan didalam komunitas atau kelompok dengan fenomena social yang terjadi di kota Bandung khususnya etnis Tionghoa dan masyarakat lokal.⁵ Maka dari itu dalam kajian ini peneliti akan mengambil judul yaitu sebagai berikut :*Transaksi Sosial Etnis Tionghoa dan Masyarakat Lokal (Studi Kasus Daerah Pecinan Jl. Kelenteng Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung)*

⁵Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Grafindo, Jakarta, 2012, h. 34

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi sosial yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal (Studi kasus daerah pecinaan Jl. Kelenteng, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung)?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong transaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal (Studi kasus daerah pecinaan Jl. Kelenteng, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung) ?
3. Apa dampak transaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal (Studi kasus daerah pecinaan Jl. Kelenteng, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara rinci tujuan penelitian ini terbagi kedalam dua bagian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui transaksi sosial yang dibangun antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal (Studi kasus daerah pecinaan Jl. Kelenteng, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung transaksi sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal (Studi kasus daerah pecinaan Jl. Kelenteng, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung).

3. Untuk mengetahui dampak transaksi sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal (Studi kasus daerah pecinan Jl. Kelenteng, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung).

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Ikut berpartisipasi dalam mengisi kekurangan literatur yang membahas mengenai masyarakat pluralisme di indonesia.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang melakukan kajian penelitian mengenai prilaku sosial, interaksi dan khususnya mengenai transaksi sosial masyarakat.
3. Sebagai acuan bagi kebijakan-kebijakan dari pemerintah sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang kondusif dan mencegah, serta meminimalisir terjadinya konflik khususnya antara etnis Tionghoa dan Masyarakat lokal.

1.5. Kerangka Pemikiran

Transaksi sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal yang bersifat assosiatif dengan bebagai macam perbedaan satusama lainnya. Namun dengan perbedaan tersebut terdapat ikatan yang erat dalam kehidupan atau aktifitas didalam masyarakat atau bisa dikatakan sebagai solidaritas didalam masyarakat. Menurut Durkheim sikap solidaritas terbagi menjadi dua yaitu solidaritas mekanik

dan solidaritas organik.⁶ Disamping itu solidaritas yang ditimbulkan adalah solidaritas yang akan menjadi model dalam transaksi sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal di Jl. Kelenteng Kota Bandung.⁷

Homans mengemukakan bahwa banyak tulisan sosiologis yang sangat abstrak dan sulit untuk melihat hubungan yang jelas dengan data empiris yang didapat dari lapangan. Konsep-konsep sosiologi seperti institusi sosial, kebudayaan, strukturnya otoritas, peran, dan status adalah konsep abstrak, bukan konsep yang benar-benar terlihat dan mudah diamati. Akibatnya, sering sulit untuk menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan gejala tertentu yang dapat diamati dengan jelas dan tidak ambigu.⁸

Menurut Homans, teori tak hanya cukup mengandung beberapa proposisi saja. Teori tentang fenomena dan prilaku sosial adalah sebuah penjelasan tentang fenomena itu sendiri. Homans berpegang kepada prinsip-prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial daripada hanya sekedar menggambarkannya. Homans mengemukakan bahwa penjelasan ilmiah harus dipusatkan pada perilaku nyata yang dapat diamati dan diukur secara empirik. Keadaan-keadaan internal (perasaan dan sikap subyektif, dan sebagainya) harus

⁶ Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja.

Solidaritas organik adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja. Yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan dalam perbedaannya.

⁷ Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras atau etnik yang berlainan yang berada dibawah satu sistem pemerintahan, ciri utama masyarakat majemuk yaitu konflik, integrasi dan paksaan. Taufik Rahman, *Glosari Teori Sosial*, ibn Sina press, Bandung, 2011, h.64 Tradisi inilah yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan termasuk agama didalamnya.

⁸ Robert Lawang,M.Z, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Gramedia Pustaka, Jakarta 1990, h. 61

didefinisikan dalam istilah-istilah perilaku (*Behavioral term*) untuk keperluan pengukuran empiris.⁹

Transaksi adalah suatu aktivitas yang melibatkan dua pihak atau lebih, untuk mempertukarkan sesuatu milik yang satu dengan sesuatu yang lain, milik pihak lain. Transaksi bisa secara langsung dilakukan pada tempat yang sama dan memerlukan kepercayaan satu dengan yang lainnya, dengan demikian antara pihak-pihak yang bertransaksi tersebut bisa ketemu langsung, sehingga kegiatan transaksi bisa berlangsung tanpa melalui media.

Satu ciri khas teori transaksi yang menonjol adalah *cost and reward*. Dalam berinteraksi manusia selalu mempertimbangkan *cost* (biaya atau pengorbanan) dengan *reward* (penghargaan atau manfaat) yang diperoleh dari interaksi tersebut. Jika *cost* tidak sesuai dengan *reward*-nya, maka salah satu pihak yang mengalaminya akan merasa sebal dan menghentikan interaksinya, sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan.

Inti teori transaksi Homans terletak pada kumpulan proposisi-proposisi dasar yang menerangkan tentang setidaknya dua individu yang berinteraksi. Ia mencoba menjelaskan perilaku sosial mendasar dilihat dari sudut hadiah dan biaya. Dalam hal ini ia termotivasi oleh teori struktural-fungsional Parsons.

Menurut Homans beranggapan bahwa dalam melihat perilaku sosial manusia, maka yang harus diamati adalah individu atau paling tidak ada dua individu yang saling berinteraksi. Dan pengamatan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

⁹*Ibid.*, h. 38

Transaksi sosial ataupun interaksi merupakan salah satu topik menarik sosiologi yang menjelaskan bagaimana berbagai elemen masyarakat menjaga kesatuan dan terintegrasi satu dengan yang lain bahkan dalam transaksi kadang terjadi kegagalan atau diasosiatif.¹⁰

Berdasarkan analisis kerangka penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika *cost* dan *reward* sesuai maka transaksi sosial akan berlangsung baik dan bertahan lama, sebaliknya jika *cost* dan *reward* tidak sesuai maka transaksi sosial tidak akan berlangsung baik dan tidak bertahan lama.



¹⁰Nicholas Abercrombie, Stepen Hill, *Kamus Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, h.284